

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyedia pelayanan kesehatan yang paling penting dalam sistem kesehatan nasional Indonesia adalah puskesmas. Sebagai pelayanan primer dalam upaya kesehatan, puskesmas bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif (Kemenkes RI, 2019). Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat membutuhkan pelayanan yang berkualitas, termasuk pelayanan kefarmasian, pelayanan kefarmasian bertujuan untuk menjaga mutu obat dan meningkatkan kesehatan masyarakat (de Souza *et al.*, 2024). Salah satunya aspek yang harus diperhatikan dalam pelayanan kefarmasian yaitu terkait penyimpanan obat (Kemenkes RI, 2020).

Penyimpanan obat merupakan bagian dari rangkaian proses pengelolaan obat, pengelolaan obat mencakup perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian penggunaan, serta pencatatan dan pelaporan (Kemenkes RI, 2020). Setiap kegiatan pengelolaan obat memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga diperlukan sistem yang terstruktur supaya seluruh proses dapat berjalan dengan lancar, dan mendukung satu sama lain terhadap ketersediaan obat saat diperlukan, ketidakefisienan penyimpanan obat menyebabkan rendahnya ketersediaan obat serta peningkatan biaya akibat penggunaan obat yang tidak rasional (Karunia, 2016).

Obat merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan dan menyerap anggaran yang signifikan (Chaira *et al.*, 2016). Oleh karena itu, penyimpanan obat perlu dijamin mutu dan keamanannya (Tuda *et al.*, 2020). Penyimpanan obat yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan berbagai kerugian, seperti ketersediaan obat yang tidak optimal, kerusakan obat sebelum masa kadaluarsa, kerusakan ini

berdampak pada penurunan kualitas dan efektivitas obat, jika obat yang rusak dikonsumsi, pengobatan menjadi kurang efektif dan dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan (Cholilah *et al.*, 2021).

Penyimpanan obat yang tidak sesuai standar bukan hanya menurunkan mutu obat, merugikan pasien, juga dapat menurunkan kualitas pelayanan dan berdampak negatif pada akreditasi puskesmas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang akreditasi di puskesmas, fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan berhak memperoleh pengakuan akreditasi. Untuk mendukung pengelolaan obat yang baik, terutama dalam hal penyimpanan obat di puskesmas, diperlukan tenaga farmasi yang profesional, memahami mengenai obat, dan memiliki jumlah tenaga kefarmasian yang memadai. Minimnya jumlah tenaga kefarmasian, khususnya apoteker di puskesmas, menyebabkan meningkatnya beban kerja tenaga kesehatan, terutama tenaga kefarmasian (Cholilah *et al.*, 2021).

Penyimpanan obat di fasilitas kefarmasian di Indonesia masih kurang efisien, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Puskesmas Kasihan menunjukkan aspek penyimpanan obat belum memenuhi standar yang ditetapkan (Setiawati & Utami, 2020). Penelitian yang telah dilakukan dalam aspek penyimpanan obat, ada beberapa indikator yang belum memenuhi standar diantaranya penyimpanan obat tertentu dan pengelolaan obat *High-Alert* (Cholilah *et al.*, 2021). Kemudian penelitian yang dilakukan di Puskesmas di Kota Pariaman, pengelolaan penyimpanan obat belum baik, dengan banyaknya obat yang rusak dan kedaluwarsa (Chaira *et al.*, 2016). Penelitian yang dilakukan di Puskesmas Buranga, menunjukkan penyimpanan obat belum sesuai dengan standar yang ditetapkan (Karunia, 2016).

Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan praktik penyimpanan obat di beberapa Puskesmas Kota dan Kabupaten Bandung. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan kefarmasian di puskesmas, yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kepuasan Pasien, tetapi juga berkontribusi pada keselamatan serta efektivitas terapi yang diberikan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penyimpanan obat di beberapa Puskesmas Kota dan Kabupaten Bandung, berdasarkan indikator yang dihasilkan dari metode Delfi yang dikembangkan oleh Satibi dan rekan rekan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penyimpanan obat di beberapa Puskesmas Kota dan Kabupaten Bandung, berdasarkan indikator yang dihasilkan dari metode Delfi yang dikembangkan oleh Satibi dan rekan rekan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi peneliti

- a. Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai penyimpanan obat, khususnya di puskesmas dan
- b. Meningkatkan kemampuan analisis dalam memanfaatkan berbagai macam indikator untuk melakukan evaluasi.

1.4.2 Bagi UPT di puskesmas

- a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya penyimpanan obat dan
- b. Dapat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya obat anggaran kesehatan, sehingga lebih efisien.